

Menakar Arah Kebijakan Publik yang Sesuai Dengan Kehendak Rakyat

Mara Agustina

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Email: maraagustina@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan publik yang sesuai dengan kehendak rakyat. Kebijakan Publik merupakan kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk ditaati dan dilakukan oleh masyarakat yang berada di Negara tersebut. Kebijakan publik yang telah disahkan oleh Pemerintah memiliki dampak atau hasil yang bermanfaat atau merugikan bagi Masyarakat yang mematuhi. Dan bagaimana sikap masyarakat dalam merespon kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti meneliti respon masyarakat serta dampak yang dialami masyarakat atas kebijakan publik tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kehendak Rakyat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut *Kamus Cambridge*, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang memengaruhi setiap orang di suatu negara atau Negara bagian atau kebijakan secara umum (Martono et al., 2022). Tujuan kebijakan publik dibuat untuk ditaati oleh masyarakat di suatu Negara dimana kebijakan publik dibuat dengan pertimbangan dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Cohen et al., 2023). Sebelum kebijakan publik disahkan terdapat langkah-langkah proses terjadinya kebijakan publik, yaitu: Identifikasi Masalah yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria, Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemandirian teknologi dan analisis dampak lingkungan, Adopsi mencakup analisis kelayakan politik gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran, Aplikasi, yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, keputusan-keputusan penetapan harga dan skenario pelaksanaan, dan Evaluasi mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode realitas sosial untuk mengumpulkan data. Penelitian ini membandingkan beberapa pendapat orang untuk memperkaya referensi. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 2 Januari sampai 24 Januari 2024. Penelitian dilakukan dengan studi literatur. Terdapat beberapa partisipan yang memberikan pendapat sebagai bahan penelitian. Pengambilan data dilakukan terhadap beberapa orang di berbagai provinsi. Sumber data diperoleh dari artikel yang di muat di internet sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan, tiga instrument yaitu: Kuesioner untuk pengertian kebijakan publik, Kuesioner untuk respon masyarakat terhadap kebijakan publik, Kuesioner untuk tujuan kebijakan publik. Untuk menyusun instrument penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut: Mencari artikel tentang kebijakan publik di internet dan

Mengadakan tanya-jawab dengan teman untuk mendapatkan masukan untuk dijadikan bahan penelitian. Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Menurut W.N.Dunn mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah list pilihan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, dan sebuah pembangunan perkotaan.
2. Menurut Woll mengungkapkan bahwa Kebijakan publik adalah sejumlah sebuah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai suatu lembaga yang dipengaruhi sebuah kehidupan masyarakat.
3. Menurut Robert Eyestone mengungkapkan bahwa kebijakan publik yakni sebagai suatu hubungan unit pemerintah dengan sebuah lingkungannya. Dalam pernyataan ini bisa diklasifikasikan sebagai *democratic governance*, yang mana didalamnya terdapat suatu interaksi negara dengan rakyatnya dalam rangka untuk mengatasi dalam persoalan publik.
4. Menurut G. Peters mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah Sejumlah sebuah kegiatan Pemerintah, baik yang dikerjakan sendiri atau melalui suatu lembaga lain, yang akan mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.
5. Menurut Carl Friedrich mengungkapkan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok, atau sebuah pemerintah agar untuk mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran.
6. Menurut mereka Merumuskan kebijakan publik adalah sebagai suatu keputusan yang tetap, dan yang ditandai oleh kelakuan yang berhubungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat sebuah kebijakan dan yang melaksanakannya.
7. Menurut Irfan Islami menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah serangkaian suatu tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki suatu tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu dalam kepentingan semua masyarakat. Ditegaskan lagi bahwa dalam kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama sebuah kepentingan publik, untuk dalam mengatasi masalah dan dalam memenuhi keinginan dan tuntutan semua anggota masyarakat.
8. Menurut Amara Raksataya mengungkapkan bahwa kebijakan publik yakni sebuah kebijakan yang sebagai sebuah taktik dan strategi yang diarahkan dalam mencapai suatu tujuan.
9. Menurut Arnold Rose mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah Sebuah rangkaian suatu tindakan yang saling berhubungan.
10. Menurut Bill Jenkins mengungkapkan bahwa Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang berdasarkan pada hubungan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah aktor politik agar untuk menentukan sebuah tujuan dan mendapatkan sebuah hasil yang berdasarkan suatu pertimbangan situasi tertentu.

Tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan barang public (*public goods*) maupun jasa public (*public service*) (Sudargini & Purwanto, 2020). Tujuan utama Kebijakan Publik mensejahterakan kehidupan masyarakat. Terdapat beberapa ciri penting kebijakan:

1. kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2. Kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variable pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup (Yolandha & Anggareni Dewi, 2021).
3. Kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana.
4. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan sejumlah pengertian kebijakan publik yang disampaikan oleh beberapa ahli, salah satunya Woll (1966) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah kegiatan pemerintah dalam memecahkan suatu masalah dalam masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemerintah membuat kebijakan yang memajukan kehidupan masyarakat untuk hidup lebih baik dan sebelum kebijakan tersebut disahkan pemerintah sudah lebih dahulu mempertimbangkan tujuan kebijakan tersebut sehingga pada saat masyarakat mengikuti kebijakan tersebut masyarakat merasakan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat. Kebijakan pemerintah tidak semuanya diterima baik oleh masyarakat oleh sebab itu pengaruh lembaga daerah sangatlah penting untuk meyakinkan masyarakat untuk menaati kebijakan publik yang disahkan oleh pemerintah pusat. Beberapa masyarakat terkadang tidak melakukan kebijakan yang dibuat dan merugikan yang lain. Oleh sebab itu, tindakan yang tegas dari Pemerintah Serta pemerataan tindakan Pemerintah dalam menjalankan kebijakan sangat diperlukan untuk kesejahteraan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui pengertian kebijakan publik menurut para ahli, mengetahui tujuan dan ciri-ciri kebijakan publik, mengetahui tahap-tahapan dibentuknya kebijakan publik oleh pemerintah dan mengetahui tanggapan masyarakat tentang Kebijakan Publik yang dibuat oleh Pemerintah.

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik perlu diperhitungkan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan (Yuniaswati et al., 2024).

Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik (Kimber, 1974; Salesbury 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan, akan menjadi ancaman yang serius; telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis; 3. menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa; 4. menjangkau dampak yang amat luas ; 5. mempermasalahakan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat ; 6. menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya) Karakteristik: Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Ilustrasi: Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak terpilih (Wibowo et al., 2024).

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan

masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada (Putri et al., 2024). Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah (Salminati & Pringgowijoyo, 2024).

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan (Khairunnisa & Alwizar, 2024). Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Setelah melakukan penelitian hasil yang didapat adalah: Beberapa kebijakan pemerintah ada yang kurang sesuai dengan kehendak masyarakat karena kurangnya tindakan dari Pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Beberapa Kebijakan publik sudah sesuai karena sebelum ditetapkan Pemerintah sudah memperhitungkan kemungkinan yang terjadi. Pemerintah diharapkan untuk terjun langsung ke lapangan agar kebijakan merata keseluruh masyarakat,

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah kebijakan publik dibuat untuk kesejahteraan rakyat. Namun, beberapa kebijakan publik belum sesuai dengan kehendak rakyat karena beberapa faktor seperti kurang tegasnya tindakan Pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut, beberapa masyarakat yang tidak mengikuti kebijakan publik sehingga merugikan masyarakat lain, terkadang perantara yang diutus Pemerintah dalam rangka menjalankan kebijakan publik tidak sesuai dengan protokol dari pusat Pemerintah. jadi, untuk kedepannya Pemerintah agar bisa membuat kebijakan publik yang tegas dan jika perlu memberi hukuman bagi yang melanggar kebijakan tersebut dan merata dalam menjalankan kebijakan untuk kemajuan masyarakat,

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, E., Hod, Y., & Ben-Zvi, D. (2023). From "Carrier" to "Creator": The re-construction of national identity in more inclusive terms. *Journal of the Learning Sciences*, 32(3), 427–454. <https://doi.org/10.1080/10508406.2023.2185147>
- Khairunnisa, I., & Alwizar. (2024). Sumber-Sumber Penafsiran Al- Qur ' an. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(1), 11–18.
- Martono, M., Dewantara, J. A., Efriani, E., & Prasetyo, W. H. (2022). The national identity on the border: Indonesian language awareness and attitudes through multi-ethnic community involvement. *Journal of Community Psychology*, 50(1), 111–125. <https://doi.org/10.1002/jcop.22505>
- Putri, E. S., Syahda, I. F., Rizaldi, M. Z., Putra, R. D., & Antoni, H. (2024). Tinjauan Yuridis

- Terhadap Kasus Pembunuhan Dengan Racun Sianida. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(1), 41–49.
- Salminati, I., & Pringgowijoyo, Y. (2024). Analisis Budaya Paca Dalam Perkawinan Adat di Desa Golo Kondeng. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, 1(1), 19–22.
- Sudargini, Y., & Purwanto, A. (2020). Pendidikan Pendekatan Multikultural Untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0 : A Literature Review. *Journal Industrial Engineering & Management Research (Jiemar)*, 1(3), 2722–8878. <https://doi.org/10.7777/jiemar>
- Wibowo, M. A. S., Pitoewas, B., & Putri, D. S. (2024). Peranan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Mengimplementasikan Profil Pelajar Pancasila. *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, 1(1), 31–40.
- Yolandha, W., & Anggareni Dewi, D. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Konsolidasi Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 911–919.
- Yuniaswati, D., Pitoewas, B., & Siswanto, E. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Memilih Dalam Demokrasi pada Pemilu Kepala Pekon. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(1), 17–25.